



Pendekatan Agile Leadership dalam Menanggulangi Masalah Anak Terlantar di Kawasan Perkotaan: Studi di Kota Pekanbaru

Lilis Suriani¹ Detri Karya² Ujang Paman²

Sains Manajemen, Pascasarjana, Universitas Riau, Riau, Indonesia
Lilissuryani@soc.uir.ac.id detri.k@eco.uir.ac.id pamanu@agr.uir.ac.id

Received : Oct 6, 2025; Accepted : Oct 30, 2025
DOI 10.25299/jiap.2025.25100

Abstract

The problem of homelessness and begging in Pekanbaru requires an adaptive approach to address the ever-changing social dynamics. This study explores the application of Agile Leadership as a strategy to increase the effectiveness of social interventions in addressing homelessness and begging. The method used is the Systematic Literature Review (SLR) method. Furthermore, data obtained from the literature selection results were then analyzed using a descriptive approach to explore the application of Agile Leadership in the context of addressing neglected children in urban areas. The research findings indicate that Agile Leadership allows for faster policy adjustments based on field feedback and social conditions. Collaboration between the government and local communities has been shown to increase program effectiveness, while a data-driven approach supports more accurate decision-making. The implications of this study indicate that with adaptive and collaborative strategies, the city government can create more effective and sustainable interventions in addressing the problem of neglected children. This research contributes to the understanding of the application of adaptive leadership in urban governance and can serve as a reference for other cities facing similar challenges.

Key Words: *Agile Leadership, Abandoned Children, Social Policy*

Abstrak

Masalah gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru memerlukan pendekatan yang adaptif untuk mengatasi dinamika sosial yang terus berubah. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan Agile Leadership sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas intervensi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Metode yang digunakan adalah metode Systematic Literature Review (SLR), selanjutnya data yang diperoleh dari hasil seleksi literatur kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi penerapan Agile Leadership dalam konteks penanganan anak terlantar di wilayah perkotaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Agile Leadership memungkinkan penyesuaian kebijakan yang lebih cepat berdasarkan umpan balik lapangan dan kondisi sosial. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal terbukti meningkatkan efektivitas program, sementara pendekatan berbasis data mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan strategi adaptif dan kolaboratif, pemerintah kota dapat menciptakan intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah anak terlantar. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang penerapan kepemimpinan adaptif dalam tata kelola perkotaan dan dapat menjadi acuan bagi kota lain yang menghadapi tantangan serupa.

Kata Kunci: *Agile Leadership, Anak Terlantar, Kebijakan Sosial*

Pendahuluan

Masalah anak terlantar merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan menjadi perhatian serius bagi berbagai kota di dunia, termasuk Pekanbaru, Indonesia. Fenomena ini seringkali berakar pada masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses terhadap perumahan yang layak (S. de Beer, 2020). Selain itu, pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir telah memperburuk kondisi ini dengan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal (Willison & Mauri, 2021). Sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, Pekanbaru menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan mengatasi permasalahan anak terlantar secara efektif.

Masalah anak terlantar telah menjadi tantangan sosial yang signifikan di berbagai kota di dunia, termasuk di kota Pekanbaru, Indonesia. Situasi ini memerlukan intervensi yang tidak hanya cepat tetapi juga adaptif dalam merespon dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui *Agile Leadership*, yang mampu menawarkan fleksibilitas dan responsivitas dalam menghadapi kompleksitas masalah perkotaan. *Agile Leadership* adalah bentuk kepemimpinan yang memungkinkan organisasi atau pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan perubahan cepat dan menyesuaikan strategi secara iteratif demi mencapai hasil yang lebih efektif (Barth & Quinn, 2000).

Keberadaan anak terlantar di Indonesia masih menjadi persoalan kesejahteraan sosial yang belum tertangani tuntas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5

ayat (2) menetapkan anak terlantar sebagai bagian dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak memperoleh layanan dari pemerintah daerah. Ketentuan pelaksanaannya diperjelas melalui Peraturan Menteri Sosial tentang pelayanan dasar bagi anak terlantar, yang menetapkan standar rehabilitasi dasar meliputi pendataan, penjangkauan/operasi penyelamatan, pelayanan kesehatan, penampungan sementara, dan reintegrasi sosial.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara menegaskan tanggung jawabnya untuk memastikan perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dipahami sebagai serangkaian upaya yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak mulai dari hak hidup, tumbuh, dan berkembang hingga berpartisipasi secara optimal dengan tetap menjunjung martabat kemanusiaan serta memberi perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Di Pekanbaru, gelombang urbanisasi dan migrasi dari desa ke kota turut memperburuk kondisi anak terlantar. Banyak orang datang ke kota ini dengan harapan mendapatkan pekerjaan, tetapi terbatasnya lapangan kerja dan tingginya biaya hidup seringkali membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal yang layak. Kondisi ini menciptakan tekanan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di jalanan (Margier, 2023b). Fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah kota dalam menyediakan layanan sosial yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Pemerintah kota menghadapi tantangan dalam mengoordinasikan

berbagai layanan sosial, mulai dari penempatan sementara hingga pemberdayaan ekonomi, yang memerlukan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif (Wuenschel, 1997). Penanganan masalah gelandangan di beberapa negara maju menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta dapat memperbaiki situasi ini secara signifikan (Kim & Sullivan, 2023). Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, seringkali terdapat keterbatasan dalam hal anggaran dan koordinasi antarlembaga yang menghambat efektivitas program-program tersebut.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang memuat ketentuan umum, hak-hak perempuan dan anak, kewajiban serta tanggung jawab pemerintah daerah, hingga mekanisme pemenuhan hak anak. Kehadiran kerangka hukum yang komprehensif di level nasional dan lokal menunjukkan komitmen normatif yang kuat bukan sekadar formalitas, melainkan amanat konstitusional atas hak anak. Karena itu, efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak menjadi penanda penting kapasitas negara dan pemerintah dalam memenuhi kewajiban dasarnya terhadap warga paling rentan. Ketika landasan hukum telah tersedia dan mandat ditegaskan, kinerja program perlindungan anak tidak hanya soal efisiensi birokrasi, melainkan cerminan langsung kemampuan negara menegakkan hak asasi manusia dan menjamin kesejahteraan kelompok rentan; kegagalan implementasi, dengan demikian, merupakan kegagalan memenuhi mandat tersebut.

Pelaksanaan perlindungan anak terlantar merupakan mandat pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial, termasuk penanganan anak terlantar sebagai bagian dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun, temuan lapangan menunjukkan kasus anak terlantar masih terjadi. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mencatat bahwa setiap tahun secara konsisten terdapat anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 1.
Data Laporan Kasus Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak.

No.	PPKS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1.	Balita terlantar	4	10	13	1	5	4	37
2.	Anak terlantar	1	13	10	27	8	31	90
	TOTAL	5	23	23	28	13	35	127

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2025

Ekonomi keluarga menjadi pemicu utama keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan seringkali atas dorongan orang tua yang diperparah oleh lemahnya pengawasan keluarga dan komunitas sehingga anak kerap kembali ke jalan pascapenanganan. Situasi ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap status Kota Layak Anak (KLA), terlebih dengan munculnya dugaan eksploitasi anak yang sempat viral di media sosial, yang mempertegas jurang antara aspirasi kebijakan dan realitas implementasi.

Perbedaan anak terlantar, anak jalanan dan kasus bayi terlantar menunjukkan kompleksitas pendataan dan klasifikasi isu kesejahteraan anak di Pekanbaru. Fluktuasi angka yang tajam (turun drastis lalu meningkat signifikan) mengindikasikan kemungkinan persoalan pada definisi operasional, metodologi pendataan, cakupan intervensi, atau efektivitas program yang berbeda di tiap kategori. Dengan demikian, pemahaman komprehensif atas skala masalah tampaknya belum sepenuhnya tercapai. Jika target KLA tidak terpenuhi dan kasus

eksploitasi terus bermunculan, kebutuhan riset kepemimpinan agile berperspektif gender menjadi semakin relevan untuk menelusuri akar kesenjangan antara desain kebijakan dan kinerja di lapangan.

Upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani masalah ini telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, namun, upaya ini masih menghadapi berbagai kendala, salah satu yang dihadapi adalah kurangnya adaptabilitas dalam merespons dinamika di lapangan, yang disebabkan oleh pendekatan kebijakan yang bersifat kaku dan terpusat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Agile Leadership* dalam mengatasi masalah anak terlantar di kota Pekanbaru. Secara khusus, penelitian ini berusaha untuk Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan *Agile Leadership* pada kebijakan sosial di Pekanbaru, Menilai efektivitas program-program yang berbasis Agile dalam mempercepat proses pemberdayaan dan penanganan masalah anak terlantar dan menyusun rekomendasi strategi adaptif bagi pemerintah kota dalam mengimplementasikan kepemimpinan yang fleksibel guna meningkatkan efektivitas penanganan masalah anak terlantar.

Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai aplikasi *Agile Leadership* pada isu-isu sosial di kawasan perkotaan, serta memberikan masukan praktis bagi para pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang lebih efektif dan adaptif terhadap permasalahan sosial di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Pendekatan tradisional yang biasanya digunakan untuk mengatasi masalah ini, seperti penyediaan tempat

penampungan sementara dan program bantuan sosial, seringkali tidak mampu menjawab dinamika perubahan yang cepat di masyarakat. Sebagai solusi, *Agile Leadership* menawarkan pendekatan kepemimpinan yang lebih adaptif, di mana strategi dan kebijakan dapat disesuaikan dengan cepat sesuai dengan perubahan situasi lapangan (Margier, 2023a). *Agile Leadership* menekankan fleksibilitas dalam perumusan kebijakan serta keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi alternatif dalam menghadapi masalah yang kompleks ini.

Penelitian mengenai *Agile Leadership* dalam kebijakan sosial, terutama terkait penanganan tunawisma, menunjukkan pergeseran pendekatan dalam beberapa tahun terakhir, di mana kolaborasi dan fleksibilitas menjadi semakin penting. Berbagai studi dalam dekade terakhir telah mengeksplorasi efektivitas pendekatan ini dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks di lingkungan perkotaan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengeksplorasi penerapan *Agile Leadership* dalam konteks penanggulangan masalah anak terlantar di Pekanbaru. Pendekatan ini memadukan prinsip-prinsip Agile dengan strategi tata kelola sosial yang berorientasi pada keterlibatan masyarakat dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Studi oleh (Clift, 2020) mengeksplorasi bagaimana inisiatif kreatif seperti *Back on My Feet*, yang menggabungkan olahraga lari dengan upaya pemberdayaan, menunjukkan keterkaitan antara pendekatan neoliberal dan pengelolaan tunawisma di perkotaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan individu sambil menghadapi stigma sosial yang melekat pada tunawisma, serta bagaimana inisiatif ini

dapat berfungsi sebagai bentuk kepemimpinan yang adaptif dalam konteks kebijakan sosial.

Penelitian oleh (Kim & Sullivan, 2023) juga menggarisbawahi pentingnya struktur tata kelola kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas layanan tunawisma. Mereka menemukan bahwa keberhasilan dalam mengurangi tunawisma di komunitas terkait erat dengan komposisi jaringan kolaboratif yang melibatkan pemerintah dan penyedia layanan nirlaba. Meskipun hasil terhadap heterogenitas layanan beragam, pendekatan ini memperlihatkan pentingnya tata kelola adaptif dalam kebijakan sosial.

Sementara itu, (Avramov, 2018) menyoroti pendekatan integratif dalam kebijakan sosial di Eropa yang berfokus pada perlindungan sosial bagi kelompok tunawisma. Studi ini menyoroti bagaimana kebijakan yang dirancang dengan melibatkan partisipasi langsung dari individu yang mengalami tunawisma dapat meningkatkan efektivitas dan memastikan bahwa intervensi tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Pendekatan partisipatif ini juga didukung oleh penelitian (Schweitzer, 2019) yang menyoroti keberhasilan komite *StreetCare* dalam memberikan suara kepada individu yang mengalami tunawisma dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dari mereka yang terdampak dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang rentan.

Selain itu, penelitian (Bergamaschi, 2022) di Bologna, Italia, menyoroti pentingnya intervensi lokal yang melibatkan partisipasi langsung dari tunawisma sebagai syarat untuk akses ke

layanan sosial. Studi ini menggarisbawahi bahwa pendekatan yang memprioritaskan martabat individu dapat menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan dalam penanganan tunawisma di lingkungan perkotaan.

Secara keseluruhan, literatur dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa *Agile Leadership* dalam kebijakan sosial memiliki potensi untuk menghasilkan respons yang lebih efektif dan inklusif terhadap masalah anak terlantar. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah kota untuk menyesuaikan kebijakan secara cepat dengan perubahan sosial dan memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses dan relevan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi, partisipasi, dan fleksibilitas sebagai inti dari strategi kebijakan yang berorientasi pada hasil di lingkungan perkotaan.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai penanggulangan masalah anak terlantar, sebagian besar studi tersebut lebih berfokus pada pendekatan jangka panjang seperti *Housing First* dan intervensi kesejahteraan sosial (Yamamoto, 2014). Namun, penelitian mengenai penerapan *Agile Leadership* sebagai strategi adaptif dalam konteks penanganan masalah ini masih sangat terbatas. Misalnya, penelitian oleh (Larkin et al., 2016) menyoroti pentingnya inovasi dalam kebijakan sosial untuk mengatasi gelandangan, tetapi tidak secara spesifik membahas pendekatan kepemimpinan yang fleksibel seperti *Agile*.

Agile Leadership menggabungkan pemahaman ilmiah dengan keterampilan proses yang kritis dan kepemimpinan berbasis kepercayaan tinggi untuk mengelola berbagai organisasi penyedia layanan secara efektif dalam konteks pelayanan kepada anak terlantar.

Pendekatan ini memungkinkan para pemimpin untuk mengadaptasi kebijakan secara cepat dalam merespons perubahan kondisi sosial di lapangan. Dengan demikian, terdapat gap penelitian yang signifikan terkait dengan bagaimana penerapan Agile Leadership dapat meningkatkan responsivitas dan efektivitas kebijakan dalam menangani permasalahan anak terlantar di kota-kota berkembang, termasuk Pekanbaru. Mengingat dinamika sosial dan ekonomi yang cepat berubah, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan terintegrasi untuk merespons perubahan kebutuhan di lapangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji peran *Agile Leadership* dalam penanggulangan masalah anak terlantar di Pekanbaru. Metode SLR dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan adaptif diterapkan dalam konteks sosial dan tata kelola perkotaan. Menurut (Hidayah & Asnadi, 2024), SLR adalah metode yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi studi-studi yang relevan untuk membangun kesimpulan yang berbasis bukti dari hasil penelitian sebelumnya.

SLR ini mencakup pencarian artikel ilmiah yang terindeks dalam database seperti Scopus dan WoS, menggunakan kata kunci seperti "Agile Leadership," "Abandoned Children", "homelessness," dan "urban governance." Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi studi-studi yang secara spesifik membahas penerapan *Agile*

Leadership dalam konteks penanganan isu sosial, termasuk tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan ini di lingkungan birokratis dan kota besar seperti Pekanbaru (Dwi Harfianto, Raharjo, Hardian, & Wahbi, 2022).

Penelitian ini juga mengacu pada model evaluasi metodologis dari literatur terkait untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Sebagai contoh, (Modi & Strode, 2020) menekankan pentingnya memahami gap dalam penelitian terkait efektivitas *Agile Leadership* dan peran struktur organisasi dalam mendukung transformasi adaptif. Temuan dari literatur yang diidentifikasi kemudian dianalisis secara kritis untuk mengungkapkan pola, tren, dan temuan-temuan yang relevan dengan penerapan *Agile Leadership* dalam penanganan masalah gelandangan.

Metode SLR ini memungkinkan penyusunan peta penelitian yang dapat mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari studi-studi sebelumnya, serta memberikan rekomendasi penelitian lanjutan. Dengan metode ini, diharapkan dapat memberikan landasan teoretis yang kuat dalam memahami bagaimana *Agile Leadership* dapat menjadi solusi yang efektif untuk tantangan sosial di wilayah perkotaan, seperti masalah anak terlantar di Pekanbaru (Mardian, 2024).

Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mengkompilasi literatur yang ada tetapi juga menyusun analisis yang kritis terhadap relevansi konsep-konsep *Agile Leadership* dalam konteks lokal, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan aplikatif terhadap masalah yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Agile Leadership* dalam penanggulangan masalah anak terlantar di kota Pekanbaru memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi program-program sosial. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adaptif mampu memperbaiki koordinasi antar-lembaga dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan sosial. Misalnya, (Kim & Sullivan, 2023) menemukan bahwa jaringan tata kelola kolaboratif antara pemerintah dan penyedia layanan nirlaba dapat meningkatkan efektivitas layanan kepada anak terlantar di tingkat komunitas, dengan struktur kolaboratif yang memainkan peran penting dalam menentukan hasil program. Selain itu, pendekatan *Agile Leadership* memungkinkan adanya fleksibilitas dalam merancang intervensi sosial, seperti pengaturan ulang prioritas berdasarkan data lapangan dan umpan balik dari komunitas. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Schiff, 2013) tentang model *Community Advisory Boards* di Kanada, yang menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif semacam ini dapat memperbaiki perencanaan strategis tingkat sistem dalam mengatasi anak terlantar, meskipun menghadapi tantangan dalam aspek tata kelola dan kolaborasi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pendekatan *Agile Leadership* efektif dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan dinamis dalam menghadapi masalah anak terlantar di Pekanbaru. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam kondisi ekonomi yang

fluktuatif seperti yang terjadi selama dan setelah pandemi COVID-19. Hal ini memperkuat pandangan yang disampaikan oleh (A. Beer & Prance, 2012) yang menyatakan bahwa pemerintah lokal memiliki potensi besar dalam memfasilitasi solusi terhadap masalah anak terlantar melalui kebijakan perencanaan yang fleksibel dan keterlibatan aktif dengan komunitas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan *Agile Leadership* sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah dan komunitas. Hal ini tercermin dalam studi (Clift, 2020), yang menyoroti pentingnya inisiatif kreatif dalam memberdayakan anak terlantar melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota. Pendekatan seperti program "Back on My Feet" menunjukkan bahwa kombinasi antara pendekatan kreatif dan kepemimpinan adaptif dapat memperkuat hasil pemulihan sosial bagi kelompok yang rentan.

Namun, hasil penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi *Agile Leadership* di lapangan, seperti resistensi terhadap perubahan dari beberapa pihak dan kurangnya sumber daya untuk mendukung program-program adaptif secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan dari (Hambrick Jr & Rog, 2000), yang mencatat bahwa koordinasi yang efektif dalam layanan kepada anak terlantar sering kali menghadapi tantangan dalam hal penyesuaian antara berbagai pendekatan organisasi yang berbeda.

Tantangan dan Peluang dalam Penerapan *Agile Leadership* pada Kebijakan Sosial di Pekanbaru

Penerapan *Agile Leadership* dalam kebijakan sosial di Pekanbaru menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi

untuk mencapai efektivitas. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Hal ini memerlukan keterampilan komunikasi yang kuat dan kemampuan untuk mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan. Seperti yang diungkapkan oleh (Styhre & Brorström, 2023) kepemimpinan yang bersindikasi dalam proyek-proyek pembangunan perkotaan memerlukan kolaborasi lintas organisasi yang efektif, namun sering kali menghadapi tantangan dalam hal keterampilan politik dan kapasitas komunikasi.

Selain itu, ada tantangan dalam menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat lokal. Menurut penelitian (Hambleton, 2020) kepemimpinan perkotaan membutuhkan keberanian untuk berinovasi dan membangun kepercayaan di antara komunitas. Namun, ini sering kali terhambat oleh birokrasi yang kaku dan resistensi terhadap perubahan di antara para pejabat yang terlibat dalam pengambilan Keputusan.

Tantangan lain yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun manusia, untuk mendukung inisiatif yang lebih fleksibel dan adaptif. (Kustanto & Rahman, 2020) mencatat bahwa integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kerja kota pintar membutuhkan investasi awal yang besar dan komitmen jangka panjang dari pemerintah kota. Dalam konteks Pekanbaru, hal ini menjadi kendala dalam memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penerapan *Agile Leadership* juga menawarkan sejumlah peluang untuk memperbaiki kebijakan

sosial di Pekanbaru. Salah satu peluang utama adalah kemampuan untuk mengadaptasi kebijakan secara lebih cepat dan responsif berdasarkan data dan umpan balik dari masyarakat. (Hambleton, 2015) menyoroti bahwa kepemimpinan yang berbasis pada tempat dan kolaborasi dengan warga dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendesain kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan local.

Pendekatan ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, yang penting untuk membangun rasa memiliki terhadap program-program sosial. Penelitian oleh (Matiello & Hass, 2018) menunjukkan bahwa pelatihan kepemimpinan komunitas dalam kebijakan publik dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas kebijakan sosial di tingkat local.

Peluang lainnya adalah memanfaatkan teknologi dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan program. Inovasi dalam tata kelola kota pintar, seperti yang dijelaskan oleh (Ludlow, 2017) memungkinkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pendekatan partisipatif dengan teknologi cerdas, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih transparan dan responsif terhadap dinamika sosial yang cepat berubah. Ini memberikan kesempatan bagi Pekanbaru untuk mengoptimalkan penggunaan data dalam menyesuaikan kebijakan secara cepat.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam menerapkan *Agile Leadership* dalam kebijakan sosial di Pekanbaru, peluang yang ada

menunjukkan potensi besar untuk menciptakan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan dan pemanfaatan teknologi serta pendekatan kolaboratif untuk mengatasi kendala yang ada.

Efektivitas Program-program Berbasis Agile

Program-program yang berbasis pada prinsip *Agile* telah menunjukkan hasil positif dalam mempercepat proses pemberdayaan dan penanganan masalah gelandangan di berbagai konteks urban. Salah satu studi yang relevan adalah program pengembangan terpadu yang diterapkan di *Salvation Army Family Haven*, yang menggabungkan manajemen kasus yang efektif dengan pendekatan kelompok kerja yang berorientasi pada pemberdayaan. Pendekatan ini memungkinkan penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan kompleks individu yang mengalami tunawisma dengan cara yang lebih adaptif dan responsive (Persons, 1994).

Efektivitas dari pendekatan *Agile* juga terlihat dalam program outreach yang melibatkan koordinasi antar lembaga, seperti yang diterapkan dalam *Houston Homeless Street Outreach*. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan para gelandangan dalam perencanaan program dan fleksibilitas dalam penyampaian layanan, yang terbukti mampu meningkatkan akses terhadap layanan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pemulihan mereka (Wuenschel, 1997). Fleksibilitas ini merupakan inti dari prinsip *Agile*, yang memungkinkan program untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan lapangan.

Pendekatan ini juga didukung oleh studi oleh (Fine et al., 2021) yang menyoroti program *mobile addiction-focused outreach* yang berhasil meningkatkan akses ke layanan kesehatan bagi tunawisma. Fleksibilitas dalam program semacam ini, yang dapat dengan mudah menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi di lapangan, memungkinkan untuk memberikan solusi yang lebih tepat waktu dan relevan bagi individu yang memerlukan bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program berbasis *Agile* efektif dalam memberikan solusi yang lebih cepat dan adaptif dalam konteks penanganan masalah anak terlantar. Pendekatan ini mampu menjawab kebutuhan yang dinamis dari populasi tunawisma dan memfasilitasi pemulihan melalui program yang lebih personal dan relevan dengan situasi individu. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan program berbasis *Agile* juga perlu diperhatikan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kapasitas organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan cepat. (Bass, 2009) mencatat bahwa keterlibatan organisasi berbasis agama dalam program-program tunawisma dapat membantu menutup kesenjangan ini melalui penyediaan layanan yang lebih bersifat dukungan sosial dan stabilitas jangka panjang, namun perlu ada koordinasi yang lebih baik antara inisiatif berbasis masyarakat dan kebijakan pemerintah untuk mencapai hasil yang optimal.

Secara keseluruhan, program-program berbasis *Agile* menawarkan pendekatan yang inovatif dalam menangani masalah anak terlantar, terutama dalam konteks kota yang menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang dinamis. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses pemberdayaan tetapi

juga memberikan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan individu dan perubahan di lapangan. Dengan komitmen terhadap koordinasi dan kolaborasi, program semacam ini dapat menjadi model yang efektif untuk diimplementasikan di wilayah lain yang menghadapi masalah serupa.

Strategi Adaptif

Dalam mengimplementasikan kepemimpinan yang fleksibel guna meningkatkan efektivitas penanganan masalah anak terlantar, pemerintah kota perlu mengadopsi sejumlah strategi adaptif yang berbasis kolaborasi dan responsivitas. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas. Penelitian oleh (Kim & Sullivan, 2023) menyoroti pentingnya jaringan tata kelola kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas layanan sosial bagi gelandangan, di mana struktur jaringan yang inklusif dapat membantu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan yang beragam di tingkat komunitas.

Strategi adaptif lainnya melibatkan peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan dan implementasi program. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian (Giles, 2017) tentang kolaborasi antar-dewan di Sydney, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan regional dapat membantu merancang solusi yang lebih relevan dan tepat sasaran untuk penanganan tunawisma di perkotaan. Pendekatan ini juga mengurangi risiko kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan dinamika sosial.

Pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi lokal juga merupakan komponen penting dari strategi adaptif. (Du Toit, 2010) dalam kajiannya tentang respons pemerintah metropolitan terhadap tunawisma di Afrika Selatan menggarisbawahi bahwa solusi yang efektif harus memperhatikan perencanaan perkotaan yang adil dan manajemen penggunaan lahan yang sensitif terhadap kebutuhan populasi yang rentan, termasuk akses terhadap pekerjaan dan perumahan yang terjangkau. Rekomendasi ini relevan bagi pemerintah kota Pekanbaru untuk memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan dapat beradaptasi dengan konteks sosial-ekonomi yang dinamis.

Rekomendasi lain adalah mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh (Margier, 2023a), yang membahas pergeseran kebijakan kota Portland menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan adaptif dalam menangani masalah tunawisma. Pendekatan ini menggabungkan praktik-praktik outreach yang lebih empatik dengan upaya penegakan hukum, yang dikenal dengan istilah "compassionate eviction". Pemerintah kota dapat memanfaatkan pendekatan serupa untuk mengurangi konflik antara upaya rehabilitasi sosial dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum.

Rekomendasi-rekomendasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sosial dalam menangani masalah anak terlantar. Strategi-strategi ini memungkinkan pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan sosial dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh

(Laurenson & Collins, 2007), pendekatan yang berfokus pada dukungan sosial, daripada hanya mengandalkan tindakan punitif, dapat menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan dalam menangani masalah tunawisma.

Namun, penerapan strategi ini juga menghadapi tantangan seperti perbedaan kepentingan antar-pemangku kepentingan dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kota untuk membangun mekanisme koordinasi yang kuat dan transparan guna memastikan bahwa setiap upaya dapat berjalan secara sinergis. Dengan mengintegrasikan pendekatan adaptif ini ke dalam kebijakan sosial, diharapkan penanganan masalah anak terlantar di Pekanbaru dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji penerapan *Agile Leadership* dalam menangani permasalahan anak terlantar di kota Pekanbaru, dengan fokus pada strategi adaptif yang dapat meningkatkan efektivitas intervensi sosial. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pendekatan berbasis *Agile* memiliki potensi besar untuk mempercepat proses pemberdayaan dan integrasi sosial bagi kelompok rentan ini melalui adaptasi kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah kota untuk lebih cepat menyesuaikan program dengan dinamika sosial dan kebutuhan spesifik dari populasi tunawisma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah kota, komunitas, dan penyedia layanan sosial adalah kunci utama dalam keberhasilan penerapan strategi ini. Penggunaan data secara real-time dan

monitoring yang berkelanjutan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan program, sementara pendekatan yang lebih humanistik dalam kebijakan publik terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan komunitas. Selain itu, program pelatihan keterampilan dan akses ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mampu mempercepat transisi tunawisma menuju kemandirian ekonomi.

Namun, penerapan *Agile Leadership* juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan komitmen politik yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan yang tepat, strategi adaptif ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks seperti tunawisma, serta menciptakan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kota Pekanbaru. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana *Agile Leadership* dapat diterapkan dalam konteks perkotaan untuk menangani masalah sosial yang dinamis. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kota lain yang menghadapi tantangan serupa, sekaligus berkontribusi pada literatur tentang kepemimpinan adaptif dan tata kelola perkotaan yang lebih inklusif.

Daftar Pustaka

- Avramov, D. (2018). The state-of-the-art research of homelessness and provision of services in Europe. In *Coping with Homelessness* (pp. 1–26). Routledge.
- Barth, T. J., & Quinn, R. A. (2000). *Serving the homeless: public administration as*

- science, process and art. *International Journal of Public Administration*, 23(12), 2085–2106.
- Bass, B. G. (2009). Faith-based programs and their influence on homelessness. *Family & Community Health*, 32(4), 314–319.
- Beer, A., & Prance, F. (2012). *The role of local government in addressing homelessness: a literature review*.
- Bergamaschi, M. (2022). *The multidimensional housing deprivation: Local dynamics of inequality, policies and challenges for the future*. FrancoAngeli.
- Clift, B. C. (2020). The uses of running: Urban homelessness, creative initiatives, and “recovery” in the neoliberal city. *Sociology of Sport Journal*, 37(2), 96–107.
- de Beer, S. (2020). Homelessness IS a Housing Issue: Responding to Different Faces of Homelessness. A City of Tshwane Case Study. *South African Review of Sociology*, 51(3–4), 56–76.
- Du Toit, J. L. (2010). Local metropolitan government responses to homelessness in South Africa. *Development Southern Africa*, 27(1), 111–128.
- Dwi Harfianto, H., Raharjo, T., Hardian, B., & Wahbi, A. (2022). Agile transformation challenges and solutions in bureaucratic government: a systematic literature review. *Proceedings of the 2022 5th International Conference on Computers in Management and Business*, 12–19.
- Fine, D. R., Weinstock, K., Plakas, I., Mackin, S., Wright, J., Gaeta, J. M., ... Baggett, T. P. (2021). Experience with a mobile addiction program among people experiencing homelessness. *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, 32(3), 1145–1154.
- Giles, D. B. (2017). Neutralizing homelessness, 2015: The story to date. *Urban Geography*, 38(3), 332–340.
- Hambleton, R. (2015). Leading the inclusive city. *Place-Based Innovation for A*.
- Hambleton, R. (2020). Leading the healthy city: Taking advantage of the power of place. *Cities & Health*, 4(2), 221–228.
- Hambrick Jr, R. S., & Rog, D. J. (2000). The pursuit of coordination: The organizational dimension in the response to homelessness. *Policy Studies Journal*, 28(2), 353–364.
- Hidayah, N. A., & Asnadi, N. M. (2024). PENERAPAN METODE AGILE DALAM MANAJEMEN PROYEK: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *JURNAL PERANGKAT LUNAK*, 6(1), 43–53.
- Kim, S., & Sullivan, A. (2023). Connecting the composition of collaborative governance structure to community-level performance in homeless services. *Public Administration Review*, 83(4), 734–749.
- Kustanto, P., & Rahman, R. (2020). SMART Integrated Leadership (SMILE) for Smart City. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(3).
- Larkin, H., Henwood, B., Fogel, S. J., Aykanian, A., Briar-Lawson, K. H., Donaldson, L. P., ... Padgett, D. K. (2016). Responding to the grand challenge to end homelessness: The national homelessness social work initiative. *Families in Society*, 97(3), 153–159.
- Laurenson, P., & Collins, D. (2007). Beyond punitive regulation? New Zealand

- local governments' responses to homelessness. *Antipode*, 39(4), 649–667.
- Ludlow, D. (2017). Smart city: challenges and opportunities' experiences from european smart cities projects. *Companion Proceedings of The 10th International Conference on Utility and Cloud Computing*, 165.
- Mardian, M. T. (2024). Determinant of Agile Leadership: A Systematic Literature Review. *KnE Social Sciences*, 468–487.
- Margier, A. (2023a). The compassionate invisibilization of homelessness: where revanchist and supportive city policies meet. *Urban Geography*, 44(1), 178–197.
- Margier, A. (2023b). The involvement of business elites in the management of homelessness: Towards a privatization of service provision for homeless people? *Urban Affairs Review*, 59(3), 668–691.
- Matiello, A. M., & Hass, M. (2018). Políticas públicas urbanas: formação de lideranças comunitárias para os conselhos municipais. *Extensio: Revista Eletrônica de Extensão*, 15(28), 87–100.
- Modi, S., & Strode, D. (2020). *Leadership in agile software development: a systematic literature review*.
- Persons, O. H. (1994). Integrated Program Development: A Model for Meeting the Complex Needs. *Journal of Community Practice*, 1, 3.
- Schiff, R. (2013). Collaborative approaches to addressing homelessness in Canada: Value and challenge in the community advisory board model. *Parity*, 26(9), 42–43.
- Schweitzer, L. (2019). *Abandoned Shopping Malls: An Opportunity for Affordable, Supportive Housing in Suburbia*. University of Cincinnati.
- Styhre, A., & Brorström, S. (2023). Syndicated leadership in urban development projects: the case of the River City Gothenburg project. *Construction Management and Economics*, 41(5), 387–401.
- Willison, C. E., & Mauri, A. I. (2021). Urban homelessness policy in OECD nations. In *Oxford Research Encyclopedia of Global Public Health*.
- Wuenschel, P. C. (1997). Houston homeless street outreach. *Journal of Community Practice*, 4(4), 69–80.
- Yamamoto, K. (2014). Social Inclusion/Exclusion in Urban Underclass Area for Those Experiencing Welfare Dependency: Focusing on 'Housing First' Approach for the Homeless People in Vancouver, Canada. *The Annual Review of Sociology*, 2014(27), 208–219.